

POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KADER KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Olivia Manis¹, Yuli Setyowati²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

*Corresponding author: yulisety72@gmail.com

ABSTRAK

Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo merupakan lembaga masyarakat yang bertujuan mewujudkan masa depan anak yang lebih baik melalui situasi dan kondisi bagi perlindungan anak. Komunikasi interpersonal Kader KKPA dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kesejahteraan anak di Desa Gilangharjo melalui pemenuhan hak anak. Penelitian ini berupaya mengkaji pola komunikasi interpersonal antara Kader KKPA dengan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 13 orang, yang terdiri dari Pengurus KKPA, anggota KKPA dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola komunikasi yang dipakai adalah pola komunikasi sirkular dan pola komunikasi sekunder; 2) proses penyampaian informasi tentang perlindungan anak oleh kader KKPA kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk mengenalkan peran dan tugas KKPA kepada masyarakat selain itu berkunjung ke rumah warga dengan melakukan komunikasi secara tatap muka; 3) keberhasilan komunikasi interpersonal antara kader KKPA dan masyarakat dilihat dari sudut para pelaku komunikasi dengan cara komunikator memahami kondisi psikologis komunikan, bersikap ramah dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat; 4) hambatan komunikasi Kader KKPA dikarenakan sebagian masyarakat yang masih belum tahu tentang keberadaan KKPA dan ada juga masyarakat yang mengabaikan tentang keberadaan KKPA di Desa Gilangharjo, bersikap apatis dan menolak, walaupun Kader KKPA selama ini sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan anak maupun memasang *pamflet* di titik perumahan warga tentang perlindungan anak.

Kata kunci: *Pola Komunikasi, Komunikasi Interpersonal, KKPA, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

The Committee for Welfare and Child Protection (KKPA) of Gilangharjo Village is a community organization that aims to create a better future for children through situations and conditions for child protection. Interpersonal communication between KKPA Cadres and the community is needed in fighting for the welfare of children in Gilangharjo Village through fulfilling children's rights. This research seeks to examine patterns of interpersonal communication between KKPA Cadres and the community in fighting for the welfare and protection of children in Gilangharjo Village, Kapanewon Pandak, Bantul Regency, DIY. This research is a qualitative research, data collection methods using interviews, observation and documentation. The informant selection technique used purposive sampling with a total of 13 informants, consisting of KKPA management, KKPA members and the community. Based on the results of the study, it shows that: 1) the communication patterns used are circular communication patterns and secondary

communication patterns; 2) the process of conveying information about child protection by KKPA cadres to the community by conducting outreach to introduce the roles and duties of KKPA to the community besides visiting residents' homes by communicating face to face; 3) the success of interpersonal communication between KKPA cadres and the community seen from the point of view of the communicators by way of the communicator understanding the psychological condition of the communicant, being friendly and assertive, and being able to adapt to society; 4) communication barriers for KKPA Cadres because some people still do not know about the existence of KKPA and there are also people who ignore the existence of KKPA in Gilangharjo Village, are apathetic and refuse, even though KKPA Cadres have so far disseminated information to the community about child protection and posted pamphlets in point of residential residents about child protection.

Keywords: Communication Pattern, Interpersonal Communication, KKPA, Child Protection

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung menunjukkan kenaikan, Laporan kekerasan terhadap anak sepanjang bulan Januari 2020 melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat lebih dari 4000 kasus. Melalui diskusi virtual, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Valentina Ginting mengungkapkan selama rentang waktu tersebut terdapat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut, 1111 kasus kekerasan fisik, 979 kasus kekerasan psikis, 2.556 kasus kekerasan seksual, 68 kasus eksploitasi, 73 kasus perdagangan orang, dan 346 kasus penelantaran (Wardah, 2020)

Permasalahan tersebut memerlukan solusi, diantaranya dengan cara intervensi masyarakat kepada keluarga-keluarga jika terjadi tindak kekerasan pada anak. Dalam hal ini dibutuhkan tim reaksi cepat dari masyarakat untuk mencegah kekerasan anak dan melakukan perlindungan terhadap anak. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, dilaksanakan secara terus-menerus. Upaya tersebut harus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, sehingga akan terwujud kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul masih menjadi permasalahan yang kompleks dan sering terjadi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Kader) Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Kabupaten Bantul, Muhamad Zainul Zain, mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 jumlah laporan yang masuk kepada PPA sejumlah 155 kasus. Sampai akhir Oktober 2020, jumlah kasus terlapor menembus angka 120 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan memerlukan upaya yang nyata dalam mengatasi persoalan ini (Wijaya & Andika, 2020).

Upaya-upaya perlindungan anak harus semaksimal mungkin dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan berbasis masyarakat. Untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan respon cepat terhadap beberapa kasus yang muncul di masyarakat dapat dilakukan upaya melalui komunitas-komunitas terdekat dengan anak-anak. Upaya ini semestinya dilakukan oleh masyarakat, didampingi oleh tokoh masyarakat,

dan harapannya masyarakat dapat melakukan upaya-upaya secara mandiri di lingkungannya masing-masing.

Dengan melihat kebutuhan ini, keberadaan KKPA menjadi sangat penting. KKPA Desa Gilangharjo merupakan lembaga masyarakat dibentuk untuk mewujudkan situasi dan kondisi bagi perlindungan anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kehadiran KKPA banyak didorong oleh munculnya permasalahan-permasalahan anak yang timbul di seluruh lingkungan desa. Pada awalnya, secara embrio pembentukan KKPA didampingi oleh GSM (Gerakan Sosial Masyarakat) Putro Linuwih yang mendorong para tokoh masyarakat Desa Gilangharjo untuk mempercepat terbentuknya lembaga masyarakat yang sangat diharapkan dapat membantu terselesaikannya permasalahan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Komunikasi interpersonal antara kader KKPA dengan masyarakat sangat diperlukan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemahaman tentang pola komunikasi interpersonal antara kader KKPA dan masyarakat dalam menentukan cara terbaik yang harus dilakukan agar mendukung terbentuknya kepribadian anak-anak. Harapannya cara ini dapat menghindarkan anak-anak dari perilaku yang membahayakan akibat dari perlakuan orang lain. Mengingat tidak semua orang tua dapat berkomunikasi secara efektif dengan anak-anaknya dan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga perlu ditingkatkan, maka upaya melakukan komunikasi interpersonal antara kader KKPA dengan masyarakat sangat perlu dilakukan.

Dalam menjalankan program kerjanya, KKPA kerap mengalami hambatan, baik yang timbul akibat perbedaan individu maupun perbedaan kepentingan antar warga masyarakat. Sebagian masyarakat bersedia berkomunikasi secara terbuka, namun sebagian lainnya masih enggan membuka karena unsur ketidakpercayaan bahwa KKPA mampu mengatasi persoalan anak di Desa Gilangharjo. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya keinginan untuk memperbaikinya, akan sangat berdampak pada kinerja pengurus dan Kader KKPA maupun pada masyarakat, sebab KKPA dibentuk dan hadir untuk masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi harapan besar bahwa masyarakat mau terlibat dalam kegiatan KKPA.

Dalam kehidupan sosial masyarakat sewajarnya setiap individu membangun relasi dengan individu lain, sehingga terjalin sebuah ikatan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan interpersonal. Pola komunikasi akan terbentuk dari cara-cara berkomunikasi sehari-hari. Menurut Soejanto, (2005) pola komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pola komunikasi tersebut pasti melibatkan partisipan dalam berkomunikasi, saling mempertukarkan pesan dengan tujuan komunikasi tertentu. Demikian pula dalam lembaga KKPA, para kadernya perlu mengembangkan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat yang difasilitasi agar tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak tercapai.

Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola komunikasi interpersonal antara Kader KKPA dengan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, DIY. Dengan latar belakang permasalahan anak di tiap keluarga berbeda-beda, para kader KKPA dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi dan strategi komunikasi yang tepat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian berdasarkan potensi diri yang dimiliki dalam mengatasi persoalan terhadap anak di desa tersebut. Komunikasi antara Kader KKPA

dengan masyarakat perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, sebab dengan membangun komunikasi yang baik akan tercipta sikap saling terbuka antarindividu untuk membangun, memelihara, menegosiasikan diri dan meminimalisir konflik. Hal tersebut tentu membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini sangat penting sebagai upaya untuk saling berbagi pengalaman menjadi orangtua serta berbagi ketrampilan menghadapi permasalahan sehari-hari berkaitan dengan anak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu KKPA, masyarakat, dan keluarga untuk lebih meningkatkan komunikasi interpersonal secara efektif dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, dapat berupa perilaku, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks tertentu dengan memanfaatkan metode ilmiah yang tepat (Moleong J., 2017). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sumber data dengan mempertimbangkan dan membuat kriteria sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian. Dalam teknik *purposive sampling*, informan dipilih secara cermat, bukan diacak (Sugiyono, 2016). Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga belas orang, yang terdiri dari ketua kader KKPA, wakil ketua KKPA, sekretaris KKPA, bendahara KKPA, koordinator divisi penanganan kasus, anggota kader KKPA, enam masyarakat dampingan KKPA secara spesifik dan satu masyarakat yang belum pernah didampingi oleh KKPA tetapi pernah bekerjasama dengan KKPA.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan sebagai langkah verifikasi. Untuk memastikan keakuratan data yang sudah terkumpul, penulis melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi yang sudah diperoleh dari informan satu kepada informan yang lain. Triangulasi metode ditempuh dengan cara membandingkan informasi wawancara pada setiap informan dengan data hasil observasi maupun dokumentasi untuk informasi yang sama. Dengan demikian penulis menjadi lebih yakin terhadap informasi yang diperoleh dari ketiga cara pengumpulan data yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang pola komunikasi dapat ditelusuri melalui pengertian kata pola dan komunikasi. Pengertian kata pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai model. Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting atas fenomena tersebut. Secara *etimologi*, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin *Communication*, dan bersumber juga dari kata *communis* yang artinya sama, dapat diartikan sama makna. Proses komunikasi berlangsung apabila antar pihak yang terlibat dalam proses komunikasi terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Pola komunikasi menurut Soejanto (2005) yang diartikan sebagai gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pola komunikasi juga diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang saling disampaikan dapat membentuk pemahaman yang sama.

Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa Gilangharjo Nomor 8 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pada pasal 17 ayat (1) KKPA memiliki tugas dan fungsi: 1) melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak; 2) menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap anak; 3) melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan; dan 4) melakukan koordinasi dan rujukan ke lembaga layanan. Dari uraian tugas dan fungsi tersebut, KKPA Desa Gilangharjo memiliki peran untuk memperjuangkan perlindungan anak adalah membantu menangani kasus atau permasalahan terhadap anak maupun kasus dalam keluarga yang dapat diselesaikan oleh KKPA sampai tahap pencegahannya. Dalam hal ini KKPA Desa Gilangharjo selalu siap mendampingi masyarakat yang menghadapi masalah-masalah anak hingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik di lingkup keluarga atau masyarakat.

Program kerja KKPA Desa Gilangharjo lebih difokuskan untuk melakukan pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah hingga kasus selesai. Dalam proses pendampingan, KKPA dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam hal permasalahan-permasalahan anak seperti pembuatan akte kelahiran anak, dan pencegahan: pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, anak terlantar, kenakalan remaja, kekerasan seksual dan narkoba. Namun demikian, KKPA Desa Gilangharjo belum mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah anak dan masih membutuhkan pihak-pihak yang lebih berwenang menangani perlindungan anak, oleh sebab itu KKPA masih bersifat sebagai pelopor dan pelapor di Desa Gilangharjo.

Peran KKPA Desa Gilangharjo dalam memperjuangkan perlindungan anak dilakukan dengan cara membantu menangani kasus atau permasalahan terhadap anak maupun kasus dalam rumah tangga yang sekiranya bisa diselesaikan oleh KKPA sampai tahap pencegahan. Tidak jarang KKPA membantu membuat akte kelahiran bagi anak yang belum memilikinya maupun anak yang memiliki akte kelahiran tetapi bermasalah, diantaranya adalah anak-anak yang terlantar yang ditinggal oleh orang tuanya dan anak yang terlahir dari seorang ibu tanpa pernikahan.

Adapun tahapan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui tahapan pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan anak korban kekerasan, dan rehabilitasi anak korban kekerasan. Peran KKPA Desa Gilangharjo dalam memperjuangkan perlindungan anak juga dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait yang berwenang menangani perlindungan anak dan mengupayakan kesejahteraan anak, baik lembaga pemerintah tingkat kabupaten maupun provinsi. Kerja sama ini dilakukan mengingat KKPA sangat membutuhkan lembaga-lembaga tersebut dalam menangani kasus dan serta menjaga hak-hak anak, karena KKPA memiliki keterbatasan wewenang dan tidak mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah anak yang terjadi di masyarakat. Selain itu KKPA juga pernah bekerja sama dengan beberapa NGO (*Non Government Organization*) yaitu organisasi non pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya seperti *Save The Children dan Child Fund*, di samping lembaga-lembaga lokal seperti GSM Putro Linuwih, Teratai putih, Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC). Organisasi *The Save Children* atau lebih dikenal dengan program *Save the Children* merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang mempromosikan hak-hak anak, menyediakan bantuan dan membantu mendukung anak-anak di negara-negara berkembang. Kerjasama KKPA dengan *Child Fund* dilakukan pada tahun 2016-2017, lebih fokus pada hal pengasuhan anak. *Child Fund* juga ikut berperan dalam kampanye *parenting* atau pengasuhan anak di Desa Gilangharjo. Setelah masa tersebut KKPA lebih banyak melakukan aktivitas secara mandiri dengan dampingan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait.

Hasil penelitian Zulaika (2010), menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menghabiskan waktu bermain mereka dengan hal-hal yang cenderung negatif, seperti mencuri, ngamen di jalanan, mencari barang-barang bekas, dan bermain *plays station*.

Kegiatan-kegiatan tersebut mereka lakukan akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak-anak bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkannya. Dalam hal ini terlihat bahwa pola komunikasi yang dilakukan orang tua sangat mempengaruhi perilaku dan kepribadian anak. Pola komunikasi sebaiknya diterapkan orang tua dengan memprioritaskan kepentingan anak dan relasi yang terjalin idealnya bersifat interaktif, tidak hanya dari orang tua kepada anak tetapi juga dari anak kepada orang tua dan anak kepada anak yang lain dalam keluarga tersebut.

Kehadiran KKPA Desa Gilangharjo dapat dikatakan sangat membantu untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KKPA sudah menjadi kewajiban masyarakat karena KKPA hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, untuk itu perlu adanya komunikasi untuk membangun hubungan yang baik antara Kader KKPA dengan masyarakat. Dalam proses komunikasi interpersonal, KKPA mengenalkan diri ke masyarakat melalui sosialisasi maupun berkunjung ke rumah warga. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh KKPA melalui sosialisasi kepada masyarakat adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan KKPA dan komunikasi yang dilakukan oleh Kader KKPA sangat terbuka dan jujur.

Dalam menjalin hubungan interpersonal, perlu memperhatikan beberapa hal yang mendukung proses komunikasi interpersonal menjadi efektif. Dalam proses komunikasi interpersonal, antar partisipan komunikasi dapat menyampaikan pesan kepada untuk mencapai persamaan makna bersama. Proses komunikasi interpersonal tersebut bertujuan menciptakan komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang sesuai dengan tujuan komunikasi dan memungkinkan seseorang dapat terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Agar proses komunikasi interpersonal berjalan dengan baik, perlu memperhatikan komponen-komponen komunikasi (Suranto, 2005): 1) pengirim pesan atau komunikator; 2) pesan atau informasi; 3) media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan; 4) penerima pesan atau komunikan; 5) respon atau umpan balik (*feedback*); dan 6) gangguan komunikasi (*noise*). Dalam proses komunikasi interpersonal, tidak selalu keenam komponen komunikasi muncul secara bersamaan. Ada syarat minimal agar komunikasi interpersonal dapat berjalan, yakni sekurang-kurangnya meliputi tiga komponen, meliputi: komunikator, pesan dan komunikan, artinya setidaknya jika ketiga komponen tersebut sudah ada, maka komunikasi interpersonal dapat berjalan dan selanjutnya terbentuklah suatu proses komunikasi.

Proses penyampaian informasi tentang perlindungan anak oleh Kader KKPA kepada masyarakat untuk menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan masyarakat di desa Gilangharjo dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi untuk mengenalkan peran dan tugas KKPA kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan keberadaan KKPA dapat dikenal dan benar-benar menjadi lembaga yang dapat memfasilitasi masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh KKPA melalui sosialisasi kepada masyarakat adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan KKPA dan komunikasi yang dilakukan oleh KKPA sangat terbuka dan jujur. Proses komunikasi selanjutnya dilakukan saat warga masyarakat terkena kasus dan membutuhkan pendampingan dari KKPA. Sebagai wujud respon Kader KKPA, maka mereka segera berkunjung ke rumah warga untuk membantu penyelesaian kasus terhadap anak di lingkup keluarga. Komunikasi yang dilakukan bersifat tatap muka agar masyarakat menjadi lebih paham dan semakin paham tentang hak anak dan cara-cara melindunginya.

Menurut Lutfi Kusdianto (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak meliputi upaya perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa perlindungan anak dilakukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak agar tidak menjadi korban dari situasi yang

merugikan atau membahayakan dirinya. Dengan keberadaan KKPA Desa Gilangharjo sangat membantu pemerintah dan masyarakat, diperlihatkan dari banyanyak peran KKPA Desa Gilangharjo dalam mengupayakan hak-hak anak terutama dalam hal pendidikan, seperti mengupayakan anak yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah. KKPA juga sering melakukan sosialisasi, baik dengan orangtua maupun anak dengan tujuan anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. KKPA juga giat melakukan *Parenting* Pengasuhan Anak yang dilakukan di setiap dusun yang ada di Desa Gilangharjo, dengan melibatkan para kader KKPA perwakilan dari tiap-tiap dusun.

Dalam aktivitasnya, Kader KKPA harus bekerjasama dengan keluarga korban. Keluarga merupakan tempat utama bagi anak dan orang tua untuk mengkomunikasikan segala sesuatu mengenai hak anak. Pola komunikasi keluarga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Tentang pola komunikasi keluarga, Setyowati (2015) menegaskan bahwa proses belajar anak diawali dalam keluarga, artinya keluarga memiliki peran penting terhadap perkembangan anak. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses belajar anak tidak hanya sebatas di dalam keluarga, akan tetapi juga dipengaruhi oleh pola interaksi anak dengan orang lain. Fenomena di masyarakat juga memperlihatkan bahwa masih rendahnya kesadaran dari orang tua terhadap pentingnya komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial anak, sehingga banyak keluarga yang lebih mementingkan kemampuan kognitif daripada emosionalnya.

Ketika semua pihak memiliki pandangan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting untuk menjamin hak-hak anak, maka lembaga desa seperti halnya KKPA akan lebih mudah melakukan fasilitasi ketika terdapat kasus tentang penyimpangan pemenuhan hak anak, sehingga terjadi kekerasan dan anak tidak terlindungi. Proses komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat berimplikasi pada proses komunikasi dengan Kader KKPA. Komunikasi efektif bisa terjadi jika masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama tentang sesuatu hal yang dikomunikasikan. Jika dalam keluarga tidak pernah mengkomunikasikan tentang fenomena anak dan perkembangannya dengan lingkungan luar, maka jika terjadi kasus akan mengalami kesulitan penanganan. Dalam hal ini keluarga harus berfungsi sebagai tempat berkomunikasi secara efektif antar anggota keluarga, sehingga tercipta kondisi yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sukarno (2017) dalam penelitiannya tentang "Komunikasi Interpersonal Keluarga sebagai Mediasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan", menyimpulkan bahwa fungsi keluarga harus diperkuat, dengan cara ketika dalam waktu berkumpul dengan keluarga, proses interaksinya diupayakan dengan cara berkomunikasi atau mendiskusikan fenomena sosial yang sedang berkembang dan yang terjadi di luar rumah. Selama ini para perempuan desa beraktivitas secara normatif, yaitu melayani suami dan anak-anak dalam hal pendidikan saja, dan cenderung tidak menyentuh pada aspek-aspek lain berkaitan dengan komunikasi yang berdampak perkembangan anak. Dalam hal ini, komunikasi sangat dibutuhkan, sebab komunikasi dapat disebut efektif bila partisipan komunikasi menginterpretasikan memiliki kesamaan makna atas pesan yang saling dipertukarkan sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai.

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga di Desa Gilangharjo sangat bersinggungan langsung dengan pola komunikasi dengan Kader KKPA. Pola komunikasi interpersonal antara Kader KKPA dengan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo lebih banyak menggunakan pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder dan sirkular. Pola komunikasi primer merupakan proses pertukaran pesan antar partisipan komunikasi dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan nonverbal (Vito, 2007). Komunikasi verbal yang digunakan Kader KKPA kepada masyarakat adalah dengan seringnya berinteraksi dengan cara melatih

berbicara pada saat kegiatan yang dilakukan oleh Kader KKPA, sehingga masyarakat bisa percaya diri, dan memiliki keberanian memberikan informasi mengenai permasalahan yang mereka hadapi.

Pola komunikasi sekunder dipahami sebagai proses pertukaran pesan antar pihak yang berkomunikasi dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada pola komunikasi primer. Pengirim pesan perlu menggunakan media kedua ini karena sasaran komunikasi berada di tempat yang jauh atau jumlahnya banyak. Proses komunikasi secara sekunder ini akan semakin efektif dan efisien dengan dukungan teknologi informasi yang semakin canggih (Vito, 2007). Pola komunikasi sekunder oleh Kader KKPA dilakukan sejak terjadi pandemi covid-19, karena banyak pembatasan-pembatasan pertemuan. Adanya teknologi komunikasi melalui *handphone* sangat membantu proses komunikasi Kader KKPA dengan masyarakat yang perlu difasilitasi.

Pola komunikasi sekunder pada KKPA selama masa pandemi terlihat dari cara berkomunikasi dengan cara memaksimalkan *handphone* melalui aplikasi *whatsapp*. Dengan hadirnya *handphone*, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa harus bertemu secara langsung. Media ini digunakan jika ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, pengurus KKPA menyampaikan informasi melalui grup *WhatsApp*. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini, terasa komunikasi semakin lama semakin efektif dan efisien, karena masyarakat menjadi terbiasa dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin canggih. Pola komunikasi sekunder ini sangat cocok diterapkan pada masa pandemi, terutama untuk menjangkau masyarakat sebagai sasaran komunikasi yang berada jauh tempatnya dan dalam jumlah yang banyak.

Proses komunikasi sirkular menjelaskan bahwa penentu utama keberhasilan komunikasi adalah adanya *feedback* atau umpan balik dari komunikan ke komunikator sebagai gambaran arus informasi yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Dalam pola komunikasi seperti ini proses komunikasi berjalan secara terus-menerus dengan adanya umpan balik diantara pihak-pihak yang berkomunikasi (Vito, 2007). Pola komunikasi sirkular antara Kader KKPA dengan masyarakat terlihat ketika Kader KKPA berkomunikasi langsung dengan masyarakat dengan berkunjung ke rumah warga untuk membicarakan permasalahan berkaitan dengan anak, secara bergantian pihak-pihak yang berkomunikasi saling mengirim umpan balik atau tanggapan. Pola komunikasi sirkular ini juga sangat ditentukan oleh adanya rasa saling percaya antar pihak yang berkomunikasi. Informasi dan umpan balik secara sirkular beredar diantara pihak yang berkomunikasi dalam situasi yang menyenangkan dan masing-masing memosisikan diri sejajar dengan lainnya.

Dalam menjalankan perannya, kader KKPA tidak terlepas dari hambatan-hambatan komunikasi. Faktor penghambat proses komunikasi Kader KKPA dengan masyarakat meliputi; 1) sebagian masyarakat kurang percaya dengan keberadaan KKPA di Desa Gilangharjo dalam mengatasi persoalan tentang anak; 2) saling berprasangka buruk sehingga mengakibatkan sikap penolakan oleh masyarakat terhadap keberadaan KKPA; 3) kurang meratanya *skill* Kader KKPA; dan 4) masih ditemukan fenomena kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak, terbukti masih adanya korban kekerasan terhadap anak dan akibatnya termasuk pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat para Kader untuk menjalankan tugasnya, karena komunikasi dengan sebagian masyarakat tidak berjalan dengan lancar, sebagian masyarakat masih menutup diri jika mengalami kasus tentang anak, dan Sebagian lainnya menganggap masalah yang mereka hadapi sebagai aib keluarga sehingga tidak perlu disampaikan kepada pihak lain. Akibatnya, terdapat beberapa kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Bapak Zainul Zain selaku ketua Satgas KKPA, mengungkapkan:

“Faktor penghambat dalam berkomunikasi, sebetulnya karena *skill* nya kader tidak merata ada beberapa kader ketika dia sudah memberikan informasi kemudian jika terjadi kasus dia bisa menghendel karena memang dia sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun *skill* yang cukup dalam hal bagaimana dia bisa menyelesaikan kasus tersebut dan bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sampai kasus selesai. Tetapi akan berbeda jika kader di salah satu pedukuhan tidak mempunyai *skill* yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut, nah saya yang harus menjadi pen jembatan di sini karena ketika mengkomunikasikan permasalahan tersebut yang bersangkutan tidak tahu bagaimana menyikapi akhirnya yang muncul hanya dicatat, kemudian baru lapor ke kami sehingga kami juga akan memberitahukan bagaimana proses penyelesaian kasus tersebut. Jadi faktor penghambat lebih tidak meratanya skill dari KKPA dan juga memang ada di beberapa pedukuhan keterbatasan kader, misalnya di satu pedukuhan hanya satu kader saja, nah itu kemudian menjadi faktor penghambat di masing-masing pedukuhan termasuk juga kemampuan mereka masing-masing. Saya rasa ini juga menjadi faktor penghambat kalau yang lain tidak, tetapi juga mungkin kurang meratanya penerimaan KKPA di lingkungan masyarakat karena keterbatasan kita juga bersosialisasi di masyarakat sehingga ada memang orang yang belum mengenal keberadaan KKPA di desa Gilangharjo, tetapi itu tidak banyak dan itu merupakan kendala bagi kami. Jadi ketika kita melakukan intervensi terhadap suatu masalah mereka masih bertanya bapak sebagai apa disini? Ini kemudian menjadi masalah bagi kami semacam kami mengulang memperkenalkan diri terlebih dahulu tetapi memang di beberapa tempat yang sudah tahu jadi program kita berjalan dengan lancar, tetapi karena ada juga masyarakat yang cuek”

Namun demikian, proses komunikasi Kader KKPA dengan masyarakat masih dapat dilakukan karena adanya beberapa faktor pendukung, yaitu: 1) sikap saling menerima antara Kader KKPA, Pemerintah Desa dan masyarakat; 2) sikap saling percaya antara Kader KKPA, Pemerintah Desa dan masyarakat; 3) sikap ramah antara Kader KKPA, Pemerintah Desa dan masyarakat; dan 4) sikap saling menerima dari masyarakat tentang keberadaan KKPA. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa komunikasi terutama komunikasi interpersonal sangat penting karena tanpa komunikasi secara langsung masyarakat tidak paham apa yang disampaikan oleh Kader KKPA dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo. Walaupun selama ini Kader KKPA sudah melakukan berbagai upaya, diantara dengan memasang poster pencegahan kekerasan terhadap anak di titik perumahan warga di masing-masing dusun dan kader KKPA sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan KKPA, tetap saja beberapa masyarakat belum mengenal keberadaan KKPA di Desa Gilangharjo karena masyarakat mayoritas masyarakat sibuk bekerja sehingga masyarakat tidak ada waktu untuk mengenal dan terlibat dalam kegiatan dari KKPA. Atas hal tersebut kader KKPA berupaya lebih meningkatkan lagi komunikasi secara langsung dengan masyarakat yang belum paham tentang KKPA supaya sama-sama melindungi hak-hak anak dan setidaknya bisa mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Desa Gilangharjo.

Ibu Puji Wiratmi sebagai wakil ketua KKPA memngungkapkan pengalamannya:

“Dulu kita sering berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengenalkan KKPA, karena kan setiap dusun itu mempunyai satgas KKPA sendiri, jadi otomatis satgas KKPA di setiap dusun sudah menginformasikan tentang keberadaan KKPA. Selain kegiatan sosialisasi dari KKPA kepada masyarakat, KKPA juga sering berbagi pengalaman melalui *whatsapp* antar satgas KKPA maupun dengan masyarakat di dusun tersebut. Kita juga sering menasihati, membantu, yang namanya kasus kekerasan apalagi kita sebagai satgas KKPA yang sudah dipercayai, yah tentu kita

juga harus membantu karena kita juga merasakan apa yang mereka rasakan, dan juga banyak masyarakat yang sangat mendukung program kerja dari KKPA. Jadi misalnya di suatu perdukahan ada kasus, yang mengetahui kasus tersebut hanya yang menangani dan Pak Zainul sebagai ketua Satgas. Jadi sifatnya rahasia dan itu mungkin membuat masyarakat percaya kepada KKPA. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai bisa melaporkan kasus kekerasan jika terjadi kekerasan di lingkungan mereka. Kalau dulu mereka takut dimusuhi tetapi sekarang kan kalau masyarakat mau melaporkan kasus ke satgas KKPA, kan kami akan menjaga rahasia tersebut, sehingga untuk menyelesaikan kasus seperti itu kita melakukan pendekatan secara langsung ke keluarga tersebut dengan cara baik-baik”.

Komunikasi interpersonal sangat penting karena tanpa komunikasi secara langsung masyarakat tidak paham apa yang disampaikan oleh KKPA dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo. Dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dilakukan dengan komunikasi secara timbal balik. Ketika masyarakat melaporkan kasus kemudian Kader KKPA menindaklanjuti laporan tersebut, misalnya masyarakat memberi banyak informasi yang kemudian dari informasi yang didapatkan dari masyarakat itu dijadikan sebagai acuan mengambil keputusan untuk kemudian dirujuk ke lembaga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya cukup diselesaikan di tingkat paling bawah, jadi tidak harus sampai menjadi rujukan, jadi Kader KKPA tidak hanya menerima laporan saja tetapi harus berkomunikasi dua arah. Dalam aktivitas ini sangat diperlukan adanya saling kepercayaan, keterbukaan, empati, sikap saling mendukung, dan kesetaraan antara Kader KKPA dengan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan berkomunikasi tidak hanya transaksi pesan, akan tetapi terutama dimaksudkan untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk mempererat relasi. Dalam komunikasi interpersonal, tindakan saling mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pada berbagai situasi tiap orang berusaha mempengaruhi sikap orang lain agar orang lain bersikap positif sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Jika proses komunikasi seperti ini dapat berlangsung efektif, maka pada akhirnya komunikasi yang terjadi dapat meningkatkan kadar hubungan interpersonal dengan pola komunikasi yang dapat mengarah pada tercapainya tujuan berkomunikasi.

KESIMPULAN

Pola komunikasi interpersonal antara kader KKPA dengan masyarakat dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, pola komunikasi yang dipakai adalah pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi sirkular. Pola komunikasi sirkular sangat cocok diterapkan pada masa pandemi, karena dapat menjangkau masyarakat sebagai sasaran komunikasi yang berada di tempat yang jauh dan dalam jumlah yang banyak. Pola komunikasi sirkular sangat ditentukan oleh adanya rasa saling percaya antar pihak yang berkomunikasi. Informasi dan umpan balik secara sirkular beredar diantara pihak yang berkomunikasi dalam situasi yang menyenangkan dan masing-masing memposisikan diri sejajar dengan lainnya.

Proses penyampaian informasi tentang perlindungan anak oleh Kader KKPA kepada masyarakat secara sirkular lebih banyak dengan melakukan sosialisasi untuk mengenalkan peran dan tugas KKPA kepada masyarakat selain itu berkunjung ke rumah warga dengan melakukan komunikasi secara tatap muka. Pesan atau informasi yang biasanya dijadikan bahan pembicaraan adalah permasalahan tentang anak di Desa Gilangharjo, sehingga dengan adanya rangsangan tersebut komunikasi akan memberikan umpan balik secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Lutfi, K. (2016). *Peran Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak Bantul dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Perlindungan Anak* [Universitas Muhamadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15998>
- Moleong J., L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Soejanto, A. (2005). *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarno, B. (2017). Komunikasi Interpersonal Keluarga Sebagai Mediasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan. *Jurnal Unisri, 1 (1)*.
<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/1543/1361>
- Suranto, A. (2005). *Komunikasi Perkantoran "Prinsip Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran"*. Media Wicara.
- Vito, J. De. (2007). *KOMUNIKASI ANTARMANUSIA*. Professional Books.
- Wardah, F. (2020). Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020. *Voaindonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>
- Wijaya, E. P. E., & Andika, H. W. (2020). Darurat, Belum Habis 2020 Angka Kekerasan Anak di Bantul Sudah Tinggi. *Suarajogja.Id*. ogja.suara.com/read/2020/11/08/123044/darurat-belum-habis-2020-angka-kekerasan-anak-di-bantul-sudah-tinggi?page=all
- Zulaika, R. (2010). *Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Kajian Pola Komunikasi Interaksional)* [Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/10992/>